

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. UMKM merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM diklasifikasikan berdasarkan omset tahunan, yaitu usaha mikro (Rp 0–2 miliar), usaha kecil (Rp 2–15 miliar), dan usaha menengah (Rp 15–50 miliar).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM terus mengalami pertumbuhan, dari 61,65 juta unit pada tahun 2016 menjadi 65,46 juta unit pada tahun 2019 dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023) Dengan kontribusi sebesar itu, keberlangsungan dan peningkatan kinerja UMKM menjadi hal yang sangat krusial dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, selama pandemi COVID-19, UMKM mengalami tekanan berat yang menyebabkan penurunan aktivitas usaha secara signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 82% UMKM mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi. Survei Katadata Insight Center (2020) juga menunjukkan bahwa 63,9% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari

30%, sementara hanya 5,9% yang mampu mencatatkan peningkatan pendapatan. Kondisi ini berdampak besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki fase pemulihan ekonomi, kinerja UMKM mulai menunjukkan perbaikan. Data dari Bank BRI Micro & SME Index mencatat bahwa aktivitas bisnis UMKM telah kembali ke level prapandemi pada kuartal IV tahun 2021, dengan indeks mencapai angka 100 dan terus menunjukkan tren positif (Bisnis.com, 2020). Pemerintah juga menjadikan UMKM sebagai salah satu sasaran program pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan di tengah kelesuan ekonomi (Ardani, 2022).

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan ini adalah peningkatan kinerja UMKM. Kinerja UMKM menjadi indikator utama untuk menilai kemajuan suatu usaha. Untuk dapat meningkatkan kinerjanya, UMKM harus mampu mempertahankan kualitas produk, melakukan inovasi, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, serta mengikuti perkembangan teknologi (Primadhita & Budiningsih, 2020). Namun, menurut Ayu Rumini et al. (2020), banyak UMKM masih mengalami hambatan dalam meningkatkan kinerja secara konsisten. Hambatan tersebut mencakup masalah kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, kepemilikan, pemasaran, serta manajemen usaha yang belum optimal. Hal ini membuat UMKM sulit berkembang dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong peningkatan kinerja mereka. Hal tersebut menegaskan bahwa pemulihan ekonomi secara makro tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja usaha secara mikro, dan masih diperlukan intervensi yang lebih terfokus untuk membantu

UMKM mencapai efisiensi dan daya saing yang berkelanjutan (Zallesa & Pamungkas, 2022).

Perkembangan sektor UMKM menuntut pelakunya untuk siap bersaing. Tujuannya adalah untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk membuat inovasi bisnis yang unik dan meningkatkan kinerja mereka (Edy Sutrisno, 2021). Meskipun UMKM memiliki potensi besar, banyak tantangan yang dihadapi saat berkembang. Mengingat hal ini, langkah-langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan kinerja sektor UMKM. Kinerja merupakan cara untuk mengukur seberapa sukses suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ia menunjukkan hasil kerja yang terkait erat dengan sumbangsih ekonomi, kepuasan pelanggan, dan tujuan strategis organisasi (Mali, 2023). Tetapi UMKM Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Meskipun semangat wirausaha sangat tinggi, terutama di daerah, hal ini tidak sebanding dengan keadaan di lapangan. Pengusaha sering menghadapi berbagai masalah, seperti persaingan bisnis yang ketat, keterbatasan akses ke pendanaan, masalah infrastruktur, masalah pemasaran, dan ketinggalan teknologi.

Meskipun kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional sangat besar, kinerja sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Salah satu kendala utama adalah akses pembiayaan yang terbatas. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan yang memadai. Meskipun pertumbuhan kredit UMKM sempat naik sebesar 12,11% secara tahunan pada 2021, namun pada 2024 pertumbuhan ini melambat drastis hingga hanya mencapai 3,37% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

juga mencatat bahwa risiko gagal bayar di sektor UMKM relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Di sisi lain, melemahnya daya beli masyarakat turut menurunkan permintaan, yang secara tidak langsung menyebabkan pinjaman ke UMKM menjadi lebih terbatas.

Di samping itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala utama dalam peningkatan kinerja UMKM. Banyak pelaku UMKM di Indonesia merupakan wirausahawan karena kebutuhan (*necessity entrepreneurs*) dengan pengalaman bisnis yang minim. Mereka masih menghadapi kendala dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, dan perencanaan keuangan maupun pemasaran. Akibatnya, produktivitas dan daya saing UMKM masih relatif rendah dibandingkan sektor usaha berskala besar, meskipun kontribusinya terhadap ekonomi sangat besar (Kusuma et al., 2022).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan legalitas dan birokrasi usaha. Banyak pelaku UMKM belum memiliki izin usaha yang lengkap atau belum terdaftar secara resmi, sehingga sulit memperoleh akses terhadap program pembinaan pemerintah, pendanaan formal, maupun sertifikasi mutu Menurut (Indrawati & Rachmawati, 2021) regulasi dan perizinan masih menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan kapasitas UMKM secara nasional.

Melihat masih besarnya tantangan dalam peningkatan kinerja UMKM secara nasional, maka penting untuk meninjau kondisi serupa di tingkat daerah. Salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor UMKM adalah Kabupaten Karawang. Terletak di Provinsi Jawa Barat, Karawang dikenal

sebagai kawasan industri yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Jawa Barat mencapai 6.257.390 unit pada tahun 2023 (IDN Times, 2023). Besarnya jumlah tersebut mencerminkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga secara aktif mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi pembiayaan, serta adopsi teknologi untuk memperkuat daya saing pelaku usaha kecil dan menengah.

Sebagai salah satu kabupaten strategis di Jawa Barat, Karawang menunjukkan tren pertumbuhan UMKM yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Karawang mengalami peningkatan dari 14.239 unit pada tahun 2021 menjadi 15.410 unit pada tahun 2022, dan terus bertambah hingga mencapai 23.253 unit pada tahun 2023. Peningkatan jumlah ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil, kemajuan teknologi yang memudahkan pendirian dan pengelolaan usaha, serta adanya dukungan regulasi dari pemerintah daerah yang berpihak pada pengembangan sektor UMKM.

Meskipun demikian, pertumbuhan kuantitas tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja UMKM. Salah satu penyebab UMKM

di Karawang masih kesulitan bersaing dengan perusahaan besar adalah rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku usaha, yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan modal, pencatatan keuangan, serta pengambilan keputusan bisnis. Literasi keuangan mencerminkan sejauh mana seseorang memahami konsep dasar seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan pembiayaan. Pemahaman ini tidak hanya berguna dalam mengatur keuangan pribadi, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam mengelola usaha. Individu yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung mampu mengelola uangnya dengan lebih bijak dan terarah. Pengetahuan ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan keuangan, menyusun rencana pengeluaran, mempertimbangkan risiko, serta memilih alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan.

Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan membantu dalam menyusun laporan keuangan sederhana, menentukan harga jual, merencanakan penggunaan modal, serta mengevaluasi hasil usaha. Kemampuan untuk membaca kondisi keuangan dengan benar akan memudahkan pelaku usaha dalam membuat keputusan yang mendukung keberlanjutan usahanya. Selain itu, penguasaan atas informasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan dalam penggunaan dana, dan menjaga kestabilan usaha di tengah tantangan. Jika pelaku UMKM memiliki literasi keuangan yang baik, maka peluang untuk menjalankan usaha dengan produktif, efisien, dan terarah akan lebih besar.

Tidak hanya literasi keuangan, di tengah pertumbuhan UMKM yang cukup pesat di Kabupaten Karawang, modernisasi dalam sistem transaksi menjadi salah satu kebutuhan yang mulai muncul di kalangan pelaku usaha. Dengan

berkembangnya perangkat komputer dan meluasnya akses internet, berbagai bentuk pembayaran yang lebih praktis mulai banyak digunakan. Seiring waktu, penggunaan uang tunai dalam transaksi mulai dianggap kurang efisien, sehingga banyak pelaku usaha dan konsumen beralih menggunakan pembayaran digital, seperti uang elektronik dan e-money. Digital payment merupakan metode pembayaran yang menggunakan media elektronik untuk menyelesaikan transaksi, termasuk melalui transfer bank, dompet digital, dan pemindaian kode QR. Sistem ini memungkinkan proses pembayaran berjalan lebih cepat, tercatat secara otomatis, dan lebih aman dibandingkan metode konvensional.

Penggunaan digital payment dalam kegiatan usaha dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi operasional. Riwayat transaksi yang tercatat secara digital dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan, memantau arus kas, dan mengevaluasi hasil penjualan. Selain itu, kemudahan dalam proses pembayaran juga dapat memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Beberapa layanan perbankan dan penyedia jasa keuangan telah menyediakan berbagai fitur pembayaran digital yang mendukung kegiatan usaha berskala kecil dan menengah. Dengan mengelola transaksi secara digital, pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjalankan usaha secara lebih tertib, cepat, dan sesuai kebutuhan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha mereka.

Meskipun penggunaan pembayaran digital memiliki banyak manfaat, masih banyak UMKM yang belum menjadikannya sebagai metode utama dalam menjalankan transaksi usahanya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang cara kerja sistem pembayaran digital serta

manfaatnya dalam pengelolaan usaha. Beberapa pelaku usaha masih merasa lebih nyaman menggunakan pembayaran tunai karena dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan adaptasi terhadap teknologi. Selain itu, kurangnya kebiasaan dalam menggunakan aplikasi keuangan serta minimnya pendampingan teknis membuat sebagian pelaku UMKM enggan beralih ke sistem digital. Hambatan lain juga dapat muncul dari infrastruktur yang belum merata, seperti akses internet atau perangkat pendukung transaksi non-tunai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembayaran digital semakin umum digunakan di berbagai sektor, tidak semua pelaku usaha kecil langsung dapat mengadopsinya dalam kegiatan bisnis mereka. Rendahnya pemanfaatan digital payment dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan usaha dan menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kinerja UMKM.

Indah (2024) menemukan bahwa baik literasi keuangan maupun digital payment berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM. Dalam penelitiannya, pelaku UMKM yang memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan dan memanfaatkan sistem pembayaran digital menunjukkan efisiensi usaha yang lebih tinggi, pencatatan transaksi yang lebih baik, serta peningkatan dalam layanan kepada pelanggan. Temuan serupa disampaikan oleh Adriani dan Yuniar (2023), yang menyimpulkan bahwa penggunaan digital payment secara aktif mendukung peningkatan kinerja keuangan UMKM, terutama dalam hal kecepatan transaksi dan keteraturan laporan keuangan.

Namun, tidak semua hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh yang nyata. Rani & Desiyanti (2024) dalam studinya terhadap UMKM sektor makanan

dan minuman di Padang menyimpulkan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Meskipun pelaku usaha memahami konsep keuangan, hal tersebut tidak secara langsung berdampak pada hasil usaha karena masih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lokasi, daya beli konsumen, dan skala produksi. Hal senada juga disampaikan oleh Zidni Husnia Fachrunnisa et al., (2024), yang menyatakan bahwa baik literasi keuangan maupun digital payment tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kinerja UMKM di wilayah Bantul. Dalam penelitiannya, efektivitas usaha lebih banyak ditentukan oleh pengalaman berwirausaha dan jaringan pemasaran dibanding penggunaan teknologi keuangan.

Penelitian ini di replikasi dari penelitian Indah (2024) dengan judul penelitiannya adalah “Pengaruh Pembayaran Digital dan Literasi Keuangan Terhadap Perspektif Kinerja Keuangan UMKM di Kota Pangkalpinang”. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, yang berada di Kecamatan Karawang Barat. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada indikator dan dimensi yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel penelitian, yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik UMKM di wilayah Karawang Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Digital Payment terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Literasi Keuangan pada UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
2. Bagaimana Digital Payment pada UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
3. Bagaimana Kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
4. Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Digital Payment terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan dan Digital Payment terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan Digital Payment terhadap kinerja UMKM.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Literasi Keuangan pada UMKM di Kecamatan Karawang Barat.

2. Untuk mengetahui Digital Payment pada UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
3. Untuk mengetahui kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
5. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Digital Payment terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.
6. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Literasi Keuangan dan Digital Payment terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kemajuan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya pada kajian Sistem Informasi Akuntansi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pasundan Bandung.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan referensi peneliti selanjutnya baik itu Dosen

atau Mahasiswa mengenai Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan Digital Payment terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Karawang Barat.

2. Bagi UMKM di Kabupaten Karawang

Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Karawang penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai acuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan dan pemanfaatan Digital Payment.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi mengenai Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan Digital Payment terhadap Kinerja UMKM.

1.5. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa UMKM di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti.